

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan pemerintahan oleh Kepala Daerah di daerah, seharusnya memiliki arah dan tujuan yang jelas dan dilaksanakan secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengontrol perjalanan dan arah kebijakan pemerintahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang matang dari pemerintahan daerah yang tertuang dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang selanjutnya diteruskan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Rencana Kerja merupakan dokumen tahunan yang memuat capaian oleh Perangkat Daerah yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan, upaya penyelesaian persoalan-persoalan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dalam RENJA dimaksud dirumuskan penjabaran VISI dan MISI Kepala Daerah yakni **“KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYASAING”** yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam menjembatani keinginan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor kondisi potensi daerah. RENJA menjadi target program Perangkat Daerah yang hendaknya harus dicapai dalam waktu satu tahun.

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Gunungsitoli, maka Inspektorat Kota Gunungsitoli mengemban Visi dan Misi yaitu **“Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas sebagai Pilar Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”** Inspektorat sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam pasal 209 sampai 216 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 216 :

- ayat (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berkaitan pembinaan dan pengawasan serta telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) mengatur bahwa :

1. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip: Profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP, dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahapan kegiatan:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
 - d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut disusun berjangka, meliputi :

Dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan tersebut, disusun secara holistik dengan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Inspektorat Kota Gunungsitoli yang menjadi Landasan Hukum penyusunannya yakni :

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA ini adalah untuk mengoptimalkan peran Inspektorat Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan fungsi pembinaan serta pengawasan Perangkat Daerah untuk mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good governance and clean governance.

Tujuan penyusunan RENJA ini antara lain :

1. Menjadi arah dan pedoman peningkatan Kinerja dalam melakukan pengawasan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota Gunungsitoli.
2. Tersusunnya program yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pengawasan.
3. Tersusunnya rencana kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan Inspektorat Kota Gunungsitoli
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis dan peningkatan sarana prasarana yang memadai;
5. Peningkatan iklim penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah terjadinya KKN dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota pada musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud diatas, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misalnya:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b. Pencapaian MDGs,
 - c. Pengentasan kemiskinan,
 - d. Pencapaian SPM (Standart Pelayanan Minimum),
 - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan apabila rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, antarlain :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Realisasi pencapaian program yang telah dilaksanakan dalam lingkungan Inspektorat akan tertuang dalam daftar tabel berikut yang merupakan representatif dari hasil kegiatan yang dilaksanakan pada Rencana Kerja (Renja) pada tahun lalu.

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap capaian dari Inspektorat pada Tahun 2017 dapat dimunculkan/disajikan pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017.

3.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Inspektorat Kota Gunungsitoli tidak ada penetapan standart pelayanan minimal (SPM) namun tingkat pelayanan dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh Perangkat Daerah, diberikan dan dilakukan berdasarkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yakni :

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa; dan
- f. Tindak Lanjut terhadap hasil temuan BPK-RI dan APIP

Dalam Renstra Inspektorat capaian kerja 100% secara umum akan tercapai pada tahun 2016- 2021, artinya dalam tiap tahunnya tingkat capaian kerja terhadap pelaksanaan program sebesar 20 %.

3.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan Rancangan awal RKPD ini dilakukan melalui pembahasan tim yang telah dibentuk, yang kemudian dilakukan pembahasan

melalui Musrenbang Daerah Kota Gunungsitoli. Dan setelah pembahasan pada tingkat Musrenbang daerah kota Gunungsitoli, kemudian dikembalikan dan direview dan setelah itu akan diperbandingkan dengan hasil analisa kebutuhan Perangkat Daerah.

3.4 Penelaahan Usulan Program

Pada penelaahan hasil usulan program kegiatan merupakan hasil presentatif dari perbandingan antara Perangkat Daerah dan Hasil analisa kebutuhan yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan menjadi suatu usulan program.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Berdasarkan peran dan fungsi Inspektorat Kota Gunungsitoli dalam hal Pembinaan dan Pengawasan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 216 ayat 2 dan pasal 3 dimana Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah yang mana Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pasal 16 Dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan kegiatan:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian Tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional didasarkan pada Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 52 tahun 2016 Tentang tugas dan fungsi jabatan struktural inspektorat Kota Gunungsitoli.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut Inspektorat Kota Gunungsitoli menyelenggarakan tata kerja sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Pejabat fungsional pada Inspektorat Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam satuan kerja dan antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

- Inspektur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- Pejabat fungsional auditor dalam melaksanakan tugasnya.
- Pejabat fungsional auditor dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh inspektur pembantu dan bertanggungjawab kepada inspektur.
- Penyelenggaraan ketatausahaan senantiasa di koordinasikan oleh Sekretaris Inspektorat.
- Dalam hal pejabat struktural berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal maka dapat menghunjuk pejabat setingkat dibawahnya dalam melaksanakan tugas rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

• TUJUAN

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kota Gunungsitoli menetapkan tujuan sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai;
- ✓ Peningkatan manajemen pemeriksaan dalam optimalisasi system pengawasan kinerja yang professional dan terprogram;
- ✓ Peningkatan tanggapan dari obyek pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dari temuan pemeriksa;
- ✓ Peningkatan iklim dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- ✓ Menjadikan Kota Gunungsitoli sebagai daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dimana tujuan diatas diwujudkan dalam satu Visi Inspektorat Kota Gunungsitoli yakni **“Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas sebagai Pilar Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance).”**

Dimana penjelasannya yakni :

Pengawasan berarti segala usaha/kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang Berkualitas berarti pengawasan yang mengandung unsur-unsur sistem perencanaan dan pedoman pengawasan yang memadai, pelaksanaan pengawasan yang efisien, efektif dan transparan, partisipatif dan akuntabel serta system informasi hasil pengawasan yang akurat dan handal.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik berarti Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pernyataan Visi tersebut diatas ada 4 yang akan menjadi keinginan yang ingin dicapai oleh Inspektorat selama lima tahun kedepan yakni :

- ✓ Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan melalui pendidikan, pelatihan teknis serta peningkatan sarana prasarana yang memadai;
- ✓ Peningkatan manajemen pemeriksaan dalam optimalisasi system pengawasan kinerja yang professional dan terprogram;
- ✓ Peningkatan tanggapan dari obyek pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dari temuan pemeriksa;
- ✓ Peningkatan iklim dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencegah terjadinya KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

• SASARAN

Agar pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka ditetapkanlah Sasaran yang menjadi Agar pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka ditetapkanlah Misi Inspektorat Kota Gunungsitoli yakni “**Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan**”.

Makna dari misi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas Pemeriksa
Mengembangkan kemampuan dan kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli selaku aparat pengawasan fungsional Pemerintahan kota Gunungsitoli dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan

pengawasan, memantapkan sistem perencanaan, evaluasi dan monitoring, pemenuhan kuantitas sumber daya manusia sebagai kualifikasi yang ditetapkan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan kebutuhan minimum sarana prasarana pengawasan serta penyempurnaan/aktualisasi pedoman, standart, kriteria dan petunjuk teknis pengawasan

✓ Peningkatan kualitas Hasil Pengawasan

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengusutan dalam upaya memerangi penyimpangan, pelanggaran dan tindak pidana korupsi, meningkatkan efektivitas pembinaan dan konsultasi dalam upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan aparat pengawasan lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, meningkatkan penilaian dan evaluasi dalam upaya penilaian keberhasilan program dan kinerja objek pemeriksaan serta meningkatkan efektifitas pemantauan tindak lanjut dalam upaya peningkatan kinerja objek pemeriksaan.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program Strategis

Program strategis merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan perjalanan rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Sehubungan dengan langkah-langkah yang dimaksud , mencapai bagian dan sasaran program Gunungsitoli yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

3.3.2 Kegiatan Indikatif

Aktifitas merupakan kegiatan organisasi yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi sesuai dengan program strategis organisasi Inspektorat kota Gunungsitoli seluruh kegiatan diorganisir secara terpadu dengan melibatkan Bidang Pengawasan dan Sekretaris dilingkungan Inspektorat Kota Gunungsitoli, yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi umum
6. Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
7. Kegiatan Penyediaan alat Tulis Kantor
8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
10. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum
11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Monitoring/Survey/Pengawasan/ Evaluasi serta Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
13. Penyediaan Jasa Keamanan
14. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
15. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator alat berat
16. Pengadaan Meubelair
17. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung
18. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
19. Sewa Gedung Kantor
20. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
21. Kegiatan Penyusunan Program Kinerja dan Kegiatan

22. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
23. Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah kota Gunungsitoli
24. Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan
25. Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
26. Kegiatan rapat koordinasi pengawasan tingkat kota Gunungsitoli
27. Kegiatan evaluasi dan penilaian Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKj) Perangkat Daerah Lingkup Kota Gunungsitoli
28. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
29. Melakukan Kegiatan Reviu RKA Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
30. Kegiatan review Laporan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli
31. Melakukan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah
32. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan liar Kota Gunungsitoli
33. Melakukan Pengawasan terhadap penyaluran Dana Desa
34. Penelitian dan penilaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
35. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
36. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
37. Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
38. Kegiatan Review Penyerapan Anggaran APBD, Pengadaan Barang Jasa, Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Dana Desa Kegiatan
39. Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli
40. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
41. Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli
42. Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas.
43. Pelatihan Kantor Sendiri.
44. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

45. Pemeriksaan Kas Opname Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB IV
P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari TUHAN YANG MAHA ESA semoga Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

GUNUNGSITOLI, Maret 2017
INSPEKTUR KOTA GUNUGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19681127 200112 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				SKPD	JENIS KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	75.00%								
	1			Kota Gunungsitoli			Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman	2 Jenis	Adanya benda pos dan jasa pengiriman	2 Jenis	1,300,000	1,430,000	1	1
	2			Kota Gunungsitoli			Tersedianya rekening telepon dan fax	1 Tahun	Adanya rekening telepon dan fax	1 Tahun	39,128,832	43,041,715	1	1
	3			Kota Gunungsitoli			Tersedianya surat- surat kendaraan dinas/ operasional (STNK)	1 Tahun	Adanya surat- surat kendaraan dinas/ operasional (STNK)	1 Tahun	2,000,000	2,200,000	1	1
	4			Kota Gunungsitoli			Tersedianya tenaga kebersihan kantor	12 Bulan	Adanya tenaga kebersihan kantor	12 Bulan	19,271,680	21,198,848	1	1
	5			Kota Gunungsitoli			Tersedianya Honor administrasi keuangan	1 Kegiatan	Adanya Honor administrasi keuangan	1 Kegiatan	87,971,680	96,768,848	1	1
	6			Kota Gunungsitoli			Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	Adanya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Tahun	996,800	1,096,480	1	1
	7			Kota Gunungsitoli			Alat tulis Kantor	1 Tahun	Adanya Alat tulis Kantor	1 Tahun	20,091,040	22,100,144	1	1
	8			Kota Gunungsitoli			Formulir, buku dan dokumen	1 Tahun	Adanya Formulir, buku dan dokumen	1 Tahun	16,264,380	17,890,818	1	1
	9			Kota Gunungsitoli			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Adanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	2,400,000	2,640,000	1	1
	10			Kota Gunungsitoli			Tersedianya makanan dan minuman keperluan kegiatan kantor	1 Tahun	Adanya makanan dan minuman keperluan kegiatan kantor	1 Tahun	17,350,000	19,085,000	1	1
	11			Kota Gunungsitoli			Hasil rapat dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	Adanya-Hasil rapat dan konsultasi dalam daerah	1 Tahun	98,935,200	108,828,720	1	1
	12			Kota Gunungsitoli			Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidental dalam daerah	1 Tahun	Adanya biaya perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan kegiatan yang insidental dalam daerah	1 Tahun	19,800,000	21,780,000	1	1
	13			Kota Gunungsitoli			Mendukung kelancaran tugas-tugas kantor	12 Bulan	Adanya dukungan kelancaran tugas-tugas kantor	12 Bulan	-	21,198,848	1	1
	14			Kota Gunungsitoli			Tersedianya petugas operator komputer	12 Bulan	Adanya petugas operator komputer	12 Bulan	-	21,198,848	1	1
	15			Kota Gunungsitoli			Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	12 Bulan	Adanya kelancaran tugas-tugas kantor	12 Bulan	22,871,680	25,158,848	1	1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				SKPD	JENIS KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI														
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	77.00%						-		
	1			Kota Gunungsitoli			Tersedianya meubelair kantor	1 Tahun	Adanya meubelair kantor	1 Tahun	-	15,000,000	1	1
	2			Kota Gunungsitoli			Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Adanya Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	43,960,500	48,356,550	1	1
	3			Kota Gunungsitoli			Terpeliharanya Kendaraan	1 Tahun	Adanya pemeliharaan Kendaraan	1 Tahun	48,270,000	53,097,000	1	1
	4			Kota Gunungsitoli			Tersedianya gedung kantor	1 Tahun	Adanya gedung kantor	1 Tahun	60,000,000	66,000,000	1	1
	5			Kota Gunungsitoli			Terpeliharanya Peralatan, Gedung Kantor/Komputer, Printer, AC	1 Tahun	Adanya Peralatan, Gedung Kantor/Komputer, Printer AC	1 Tahun	7,780,000	8,558,000	1	1
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Cakupan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	85.00%						-		
	1			Kota Gunungsitoli			Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA. 2019	1 Kegiatan	Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA. 2019	1 Kegiatan	29,863,800	32,850,180	1	1
IV	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				Cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (%)	79.00%						-		
	1			Kota Gunungsitoli			Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler/berkala	1 Laporan	Adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler/berkala	1 Laporan	365,396,100	401,935,710	1	1
	2			Kota Gunungsitoli			Laporan hasil pemeriksaan (LHP) khusus/kasus dan sertijab tingkat kota gunungsitoli, Kecamatan dan Kelurahan/desa	1 Laporan	Adanya Laporan hasil pemeriksaan (LHP) khusus/kasus dan sertijab tingkat kota gunungsitoli, Kecamatan dan Kelurahan/desa	1 Laporan	-	-	1	1
	3			Kota Gunungsitoli			Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 Laporan	Adanya Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 Laporan	-	-	1	1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				SKPD	JENIS KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI														
	4			Kota Gunungsitoli			Hasil rapat koordinasi pengawas, konsultasi pengawasan dan studi banding pengawasan	1 Laporan	Adanya Hasil rapat koordinasi pengawas, konsultasi pengawasan dan studi banding pengawasan	1 Laporan	106,263,688	116,890,057	1	1
	5			Kota Gunungsitoli			Laporan Hasil koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dihadiri SKPD	1 Laporan	Adanya Laporan Hasil koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dihadiri SKPD	1 Laporan	40,445,340	44,489,874	1	1
	6			Kota Gunungsitoli			Laporan hasil evaluasi Laporan Kinerja (Lk) SKPD Tahun 2016	1 Laporan	Adanya Laporan hasil evaluasi Laporan Kinerja (Lk) SKPD Tahun 2016	1 Laporan	6,635,180	7,298,698	1	1
	7			Kota Gunungsitoli			Tersusunan dokumen Laporan Kinerja (Lk) Pemerintah Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	Adanya dokumen Laporan Kinerja (Lk) Pemerintah Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	-	10,000,000	1	1
	8			Kota Gunungsitoli			Laporan Hasil Reviu RKA Perangkat Daerah	1 Laporan	Adanya Laporan Hasil Reviu RKA Perangkat Daerah	1 Laporan	15,957,500	17,553,250	1	1
	9			Kota Gunungsitoli			Laporan hasil review laporan keuangan pemerintah kota gunungsitoli tahun 2017	1 Laporan	Adanya Laporan hasil review laporan keuangan pemerintah kota gunungsitoli tahun 2017	1 Laporan	9,306,820	10,237,502	1	1
	10			Kota Gunungsitoli			Laporan kegiatan Sosialisasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan	Adanya Laporan kegiatan Sosialisasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	1 Laporan	-	-	1	1
	11			Kota Gunungsitoli			Laporan Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	1 Laporan	Adanya Laporan Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	1 Laporan	66,407,300	73,048,030	1	1
	12			Kota Gunungsitoli			Laporan Hasil Pengawasan terhadap penyaluran Dana Desa	1 Laporan	Adanya Laporan Hasil Pengawasan terhadap penyaluran Dana Desa	1 Laporan	122,711,020	134,982,122	1	1
	13			Kota Gunungsitoli			Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara dan Laporan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	1 Laporan	Adanya Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara dan Laporan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	1 Laporan	44,319,840	48,751,824	1	1
	14			Kota Gunungsitoli			Laporan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Adanya Laporan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	1 Laporan	38,049,500	41,854,450	1	1
	15			Kota Gunungsitoli			Laporan Hasil Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1 Laporan	Adanya Laporan Hasil Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1 Laporan	93,203,460	102,523,806	1	1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				SKPD	JENIS KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI														
	16			Kota Gunungsitoli			Terlaksananya kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance	1 Kegiatan	Adanya kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance	1 Kegiatan	-	50,000,000	1	1
	17			Kota Gunungsitoli			Terlaksananya Review Penyerapan Anggaran APBD, pengadaan barang jasa, Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Dana Desa	1 Kegiatan	Adanya Laporan Review Penyerapan Anggaran APBD, pengadaan barang jasa, Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Dana Desa	1 Kegiatan	28,551,840	31,407,024	1	1
	18			Kota Gunungsitoli			Terlaksananya Kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	1 Kegiatan	Adanya Laporan Kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	1 Kegiatan	46,630,920	51,294,012	1	1
	19			Kota Gunungsitoli			Pemeriksaan khusus terhadap kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	10 Dokumen	Penyusunan Dokumen Laporan Pemeriksaan Kasus Internal Pemerintah, Laporan Pengaduan Masyarakat serta Terselenggaranya Sertijab di Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli	10 Dokumen	31,127,520	34,240,272	1	1
	20			Kota Gunungsitoli			Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah TP4D Kota Gunungsitoli		Terlaksananya Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah TP4D Kota Gunungsitoli	5 Laporan	19,601,240	21,561,364	1	1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				SKPD	JENIS KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI														
	21			Kota Gunungsitoli			terlaksananya Pemeriksaan Kas Opname Pemerintah Kota Gunungsitoli	1 Laporan	adanya laporan Pemeriksaan Kas Opname Pemerintah Kota Gunungsitoli	1 Laporan		25,000,000	1	1
V	Program peningkatan profesionalisme tentang pemeriksaan dan aparatur pengawasan				Cakupan Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (%)	79.00%						-		
	1			Kota Gunungsitoli			Pengawas memiliki kemampuan melaksanakan tugas fungsional dan tugas teknis	1 Kegiatan	Adanya Pengawas memiliki kemampuan melaksanakan tugas fungsional dan tugas teknis	1 Kegiatan	122,230,000	134,453,000	1	1
	2			Kota Gunungsitoli			Pengembangan kemampuan dalam melaksanakan tugas fungsional dan tugas teknis sebagai pengawas	1 Kegiatan	Adanya Pengembangan kemampuan dalam melaksanakan tugas fungsional dan tugas teknis sebagai pengawas	1 Kegiatan	28,068,000	56,136,000	1	1
VI	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan											-		

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				SKPD	JENIS KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI														
	1		Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli			Terselenggaranya Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Tersusunya kebijakan dan prosedut pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli	1 Dokumen	24,484,200	26,932,620	1	1
JUMLAH SELURUHNYA											1,747,645,060	2,090,068,462		

Gunungsitoli, Februari 2018

INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19681127 200112 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018

KOTA GUNUNGSITOLI

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	KETERANGAN	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				SKPD	JENIS KEGIATAN
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			1/2/3	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI	